



Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014

Oleh: Hikmawan Syahputra*

ABSTRACT

Muhammadiyah is the society organization that focuses on socio-religious area. As civil society, Muhammadiyah since birth has committed to contribute in building the nation and is shown through accelerating intelligence, religious enlightenment, and commitment to humanity. As Alexis de Tocqueville described the concept of civil society that the position of civil society has its own political power of the State as a countervailing force. Muhammadiyah is not a political organization nor have organizational ties to any political party, but Muhammadiyah has a strategic vision from birth to actively participate in politics, form and function development and empowerment, as well as the position itself in the presence of state/government, Muhammadiyah always develops the attitude of commanding the good and forbidding the evil in the sense of providing support to positive policies, otherwise criticizes wisely to policies that are not well regarded. Entering second century of its age, which starts from the 46th Congress in 2010 until late 2014 election, Muhammadiyah will continue to build the nation by increasing the role of nationality to the community, state and nation. Carrying out the role of national commitment to run early, the current age Muhammadiyah does such activities; First, increasing empowering, coaching, development and political education, second, increasing the involvement and participation of the actual nationality of the problems and issues of contemporary nationality, third, strengthen networks, communication and relationships between organizations and government agencies, and the fourth, increasing the advocacy function including action and service to the public interest.

Keywords: Muhammadiyah, Civil Society, Role of Politics.

PENDAHULUAN

Muhammadiyah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan dalam bentuk persyarikatan¹ yang bergerak pada wilayah dakwah amar *ma'ruf nahi munkar*² dan *tajdid*³

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

¹ Disebut persyarikatan karena Muhammadiyah adalah suatu tempat berserikat yang memiliki seperangkat idealisme dalam satu sistem gerakan yang terdiri dari wadahnya (jam'iyah), anggota (jama'ah) dan kepemimpinannya (imamah). Dalam Haedar Nashir, *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*, Malang: UMM Press, 2006, hlm. v-vi.

² Dakwah dilakukan untuk menyuruh kepada yang *ma'ruf (al-amr bil al-ma'ruf)* dan mencegah dari yang mungkar (*al nahyu 'an al-munkar*), sebagaimana yang tersurat dalam Al-Quran Surat Ali Imran 104, yang artinya, "adakanlah dari kamu sakalian, golongan yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan orang yang beruntung berbahagia" (*QS. Ali Imran: 104*). Dalam Haedar Nashir, *ibid.*, xxii

³ Karakter gerakan *tajdid* diplopori pendirinya, K.H. Ahmad Dahlan. *Tajdid* menurut Majelis Tarjih dan Pengembangan Islam (2000-2005) memiliki dua dimensi, yakni pemurnian (purifikasi) dan pembaruan atau pengembangan (dinamisasi). Dalam Haedar Nashir, *ibid.*, xxiii.

yang bersifat pencerahan, bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.⁴ Muhammadiyah berasaskan Islam, sedangkan maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terciptanya masyarakat Islam yang sebenarnya.⁵ Guna mencapai tujuan tersebut maka dilakukanlah berbagai usaha, yang diwujudkan dalam amal usaha, program dan kegiatan persyarikatan.

Muhammadiyah telah berdiri 18 November tahun 1912 Masehi silam.⁶ Keberadaannya sebagai *civil society* atau organisasi kemasyarakatan yang mencurahkan perhatian utamanya pada bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan patut diapresiasi.⁷ Namun tidak hanya itu, sebagai organisasi masyarakat atau *civil society* Muhammadiyah telah menjalankan fungsi politiknya dalam kehidupan nasional Muhammadiyah telah berkiprah untuk pergerakan kebangkitan kebangsaan, meletakkan fondasi Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dan mengakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dalam konstitusi dan cita-cita kemerdekaan,⁸ serta memelihara politik Islam yang berwawasan kebangsaan di tengah pertarungan ideologi dunia⁹.

Sebagaimana Mitsuo Nakamura¹⁰ menyebutkan, Muhammadiyah sejak berdirinya memiliki konstribusi positif yang paling menonjol sebagai *civil society*, di antaranya; *pertama*, Muhammadiyah menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dengan ikut membangun dan mengembangkan keberadaan Republik Indonesia sejak berdirinya. *Kedua*, Muhammadiyah adalah wadah yang berperan dalam mengembangkan inisiatif warga secara mandiri.¹¹ Tokoh-tokoh Muhammadiyah sejak kelahirannya seperti KH. Ahmad Dahlan, Mas Mansur, Kahar Muzakkar, Ki Bagus Hadikusumo, Jendral Besar Soedirman, Kasman Singodimejo, Buya Hamka, dan lain-lain merupakan tokoh-tokoh bangsa yang dikenal kiprah kebangsaannya di negeri ini.

Kendati dalam dinamika politik ikut menyertai perjalanan Muhammadiyah, namun Muhammadiyah sejak kelahirannya tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai politik manapun, serta konsisten bergerak pada ranah dakwah dan *tajdid* yang bersifat pencerahan.¹² Namun Muhammadiyah bukan pula anti politik. Hal ini bisa merujuk pada

⁴ Gerakan Muhammadiyah yang berkarakter dakwah dan *tajdid* (pembaharuan) tersebut didasarkan pada *Al-Quran Surat Ali Imran 104*. Surat ini pula yang melatar belakangi KH. Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah.

⁵ Mengacu pada Anggaran Dasar Muhammadiyah. Lihat dalam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Bemuhammadiyah*, Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah, 1996, hlm. 39.

⁶ Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan (1868-1923) pada 18 November 1912 Masehi atau bertepatan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah di Yogyakarta. Dalam Hedar Nashir, *Muhammadiyah Abad Kedua*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, hlm. 41.

⁷ Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm 17.

⁸ Haedar Nashir, *Op.cit*, hlm. 53-54.

⁹ *Ibid.* 67

¹⁰ Mitsuo Nakamura adalah Professor Antropologi dari Universitas Chiba. Dia adalah Pengamat Gerakan Muhammadiyah. Dalam menulis disertasinya dari Cornell University, AS dia mengambil judul yang diterjemahkan "Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin, Studi Kasus Gerakan Muhammadiyah di Kotagede 1900-1970".

¹¹ Wawancara yang dilakukan Haedar Nashir tahun 1988. Dalam Tim Pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyah, *Muhammadiyah: Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990, hlm. 113-115.

¹² Sikap konsisten Muhammadiyah untuk tidak terlibat dalam politik praktis dalam sejarah dan praktiknya tidak lepas dari pengaruh dan tarikan politik, misalnya ketika penempatan kader-kader Muhammadiyah yang mendominasi majelis tinggi Masyumi, pendirian Parmusi, memporiori aliansi umat

khittah (garis perjuangan) Muhammadiyah.¹³ Kontribusi politik Muhammadiyah, sebagaimana posisinya sebagai *civil society* adalah pembinaan masyarakat dan berperan aktif dalam fungsi kritik dan masukan terhadap Negara.¹⁴ Bagi Muhammadiyah, politik yang dikembangkannya adalah politik nilai¹⁵ yang tidak pernah jauh dari rakyat, sehingga ranah politik yang dikembangkannya adalah ranah politik yang selalu berpihak pada nilai, termasuk kaum *mustadh'afin*.¹⁶

Melalui prinsip-prinsip *khittah* yang telah dikembangkan, Muhammadiyah tidak hanya menggunakan *khittah*-nya tersebut sebagai pedoman untuk tidak terlibat dalam politik praktis untuk merebut kekuasaan, karena lebih memfokuskan pada gerakan dakwah, tetapi juga pedoman untuk bertindak untuk selalu kritis dan peduli terhadap masalah bangsa dan negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam poin kelima pada *Khittah* Denpasar 2002:¹⁷

“Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dengan jalan memengaruhi proses kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekam bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.”

Melalui pendekatan teori *civil society* yang dikembangkan Alexis de Tocqueville yang telah dijabarkan di atas menegaskan Muhammadiyah pada posisinya sebagai *civil society* memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan politik. Sebab melalui teori *civil society* yang dikembangkan oleh Alexis, Muhammadiyah berada dalam posisi sebagai negosiator masyarakat untuk menyalurkan aspirasi ke pemerintah

melalui PII, mengizinkan M. Amien Rais selaku ketua PP Muhammadiyah waktu itu untuk melakukan ijtihad politik, mendukung M. Amien Rais dalam kemenangan Pemilu Presiden Tahun 2004 (bisa dilihat pada: Suwarno, 2001, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, Yogyakarta: UII Press dan Fajlurrahman Jurdi, 2007, *Aib Politik Muhammadiyah*, Yogyakarta: Juxtapose), sehingga ini yang memberikan paksaan kepada Muhammadiyah untuk melakukan *ikhtiar* atau *ijtihad* politik (lihat: Haedar Nashir, 2008, *Khittah Muhammadiyah tentang Politik*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah).

¹³ *Khittah* atau garis perjuangan Muhammadiyah adalah landasan atau pola dasar Muhammadiyah dalam bertindak yang di dalamnya berisikan rumusan, teori, metode, strategi serta pemikiran Muhammadiyah dalam berjuang yang sifatnya dinamis. Lihat: Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah tentang Politik*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008, hlm. 16.

¹⁴ Hal ini disebutkan misalnya dalam *Khittah* Denpasar 2002 pada poin ketiga, keempat, kelima dan kesembilan, yang akan dijabarkan lebih rinci pada BAB IV.

¹⁵ Politik nilai sering juga dimaknai oleh Din Syamsuddin dengan Politik Alokatif atau dengan bahasa Amien Rais dan Ahmad Syafi'i Ma'arif dengan istilah *high politics*, yaitu politik yang mendistribusikan subsistensi nilai-nilai Islami dan moral ke dalam proses politik sebagai dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu usaha untuk mengajak manusia kepada kebenaran dan meninggalkan kemungkaran, dalam Haedar Nashir, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, Malang: UMM Press, 2006, hlm.105.

¹⁶ Politik nilai yang dimaksudkan adalah politik yang selalu didasarkan pada nilai-nilai yang ada di masyarakat yang sifatnya akomodatif. Artinya Muhammadiyah mengembangkan politiknya selalu berpihak kepada kepentingan rakyat (*mustadh'afin*) tanpa memiliki tendensi dan kepentingan apapun, kecuali kepentingan dakwah. Dalam Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, hlm. 32

¹⁷ Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah.. Op.Cit.*, hlm. 37.

untuk memengaruhi kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan cita-cita luhur bangsa.¹⁸

Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa Muhammadiyah dalam menjalankan peran politik di usianya memasuki abad kedua saat ini perlu adanya sikap konsistensi terhadap *kihittahnya* dalam berperan aktif menjadi jembatan bagi masyarakat menghadapi permasalahan bangsa. Karenanya dalam peristiwa sejarah dan persentuhannya dengan perpolitikan nasional, Muhammadiyah sering kali dianggap telah keluar dari tujuan organisasi, yang sejatinya Muhammadiyah adalah sebuah organisasi kemasyarakatan berbasis agama yang mencurahkan perhatiannya di bidang sosial, dan pendidikan, misalnya keterlibatan Muhammadiyah yang terlalu praktis dalam berpolitik, seperti pengalaman keterlibatan Muhammadiyah dalam anggota istimewa Masyumi dan menginisiasi berdirinya Parmusi (Partai Muslimin Indonesia),¹⁹ atau yang terbaru keterlibatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sewaktu melakukan aksi dukung mendukung secara eksplisit terhadap salah satu calon presiden pada Pemilu 2004 telah mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit.²⁰ Muhammadiyah dijadikan basis dukungan massa partai politik, serta fokus dakwah kemasyarakatan Muhammadiyah mulai teracuhkan. Dengan segala pencapaiannya sepanjang satu abad silam berada dalam posisi yang tepat sehingga pantas untuk meningkatkan kontribusinya kepada warga negara dan bangsa Indonesia di usianya pada awal abad kedua saat ini. Penelitian ini menjelaskan bagaimana sesungguhnya kedudukan peran, sikap dan fungsi politik yang diambil oleh Muhammadiyah dalam memposisikan dirinya sebagai *civil society* dan bagaimana aktualisasi peran politiknya tersebut memasuki usia yang kedua abad saat ini yang dimulai sejak Muktamar ke-46 tahun 2010 hingga menjelang Pemilu 2014.

TEORI CIVIL SOCIETY: ALEXIS DE TOCQUEVILLE

Dalam studi sebuah negara yang demokratis keberadaan masyarakat sipil (*civil society*) sangat dibutuhkan, terlebih-lebih sebagai kekuatan pengimbang negara. Gagasan baru mengenai konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik) halnya juga demikian, *civil society* merupakan bagian yang tak terbantahkan dalam relasinya membangun negara, disamping keberadaan *state/government* dan *privat sector*. Konsep baru yang banyak diadopsi oleh sebagian besar negara dunia semanjak tahun 1990-an adalah konsep *civil society* yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville. Hal ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya negara di dunia yang menerapkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, pasca runtuhnya paham-paham negara otoriter di berbagai negara.²¹

Konsep yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville juga diadopsi di Indonesia. Hal ini dapat dikaitkan dengan semakin berkembangnya kedudukan berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di

¹⁸ Menurut Tocqueville pola gerakan ini diperlukan, karena ingin memposisikan *civil society* sebagai penyeimbang (*checks and balances*) kekuatan Negara. Lihat: Muhammad A.S Hikam, *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Erlangga, 2000, hlm. 118-119.

¹⁹ Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah..*, *Op.Cit.*, 29-34

²⁰ Mu'arif, *Meruwat Muhammadiyah; Kritik Seabad Pembaruan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005, hlm. hlm. 286

²¹ Menurut Hikam bahwa konsep *civil society* yang dikembangkan Tocqueville menjadi contoh kemampuan masyarakat sipil dalam menegakkan sistem politik pada negara demokrasi, dalam Muhammad A.S Hikam, *Ibid.*, hlm. 118.

Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru. Reformasi yang terjadi di tahun 1988, telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk secara bebas berekspresi tanpa intervensi negara.

Alexis de Tocqueville memaknai *civil society* sebagai sekelompok masyarakat sipil yang memiliki kedudukan yang mandiri, berdiri sendiri, dan tanpa intervensi negara, namun masih membutuhkan negara sebagai pembuat peraturan yang legal formal dalam mengatur *civil society*.²²

Tocqueville menyebutkan *civil society* merupakan wilayah kehidupan sosial terorganisasi yang memiliki ciri antara lain; kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*).²³ Tocqueville juga menekankan adanya dimensi kultural yang membuat *civil society* dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang, yakni keterikatan terhadap norma-norma dan nilai hukum yang diikuti warganya.²⁴

Tocqueville menambahkan bahwa kedudukan *civil society* memiliki kekuatan politik tersendiri, kekuatan pengimbang yang dapat melakukan *checks and balances* terhadap kekuatan negara.²⁵ Gerakan sipil yang dilakukan bukan diprioritaskan pada pengambil alihan jabatan publik, tetapi melalui *engagement*, adanya kontrak sosial yang dilakukan dengan masyarakat dengan keyakinan bahwa kebaikan bersama dapat dipastikan melalui proses demokratis.²⁶ Jadi gerakan sosial yang dilakukan *civil society* melalui proses negosiasi atau lobi yang dialogis dengan negara untuk mencari solusi bersama yang sesuai dengan konsep *good governance*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam menggunakan teknik penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif laporan penelitian berisikan kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terhadap penyajiannya.²⁷ Adapun jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan jenis data skunder. Jenis data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.²⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara.²⁹ Sedangkan jenis data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua atau sumber sekunder,³⁰ dan peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis Model Alir (*flow model*),³¹ yaitu analisis data yang dimulai dari mereduksi dan menelaah data yang telah didapat, yang dimulai dengan pengumpulan data sekunder atau dokumentasi dan dari hasil penelitian terdahulu dengan cara membuat

²² Meylia Hasiantha, *Konsep Civil Society*, hlm. 6. Dalam:
<http://www.scribd.com/doc/89866695/Konsep-Civil-Society#download>, 15/10/2013, 18.20 WIB.

²³ Muhammad A.S Hikam, *Op.cit.*, hlm. 118-119.

²⁴ *Ibid*, hlm. 119.

²⁵ *Ibid*, hlm. 68

²⁶ Luthfi. J. Kurniawan. Dkk., *Negara, Civil Society dan Demokratisasi: Pergerakan Membangun Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan*. Malang: In-TRANS Publishing. 2008, hlm. 127.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, Bandung: ROSDA, 2007, hlm.11.

²⁸ Agus Salim, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm. 128

²⁹ Lisa Horrison, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm.91

³⁰ Agus Salim, *Op.Cit.*, hlm. 128.

³¹ *Ibid.*, hlm. 21

abstraksi, menentukan perumusan masalah dan fokus masalah. Selanjutnya dengan cara mendiskripsikan data, yaitu dengan cara menyusun data dan informasi ke dalam teori yang telah ditentukan. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan, berupa temuan baru dan jawaban dari masalah penelitian.

MUHAMMADIYAH SEBAGAI CIVIL SOCIETY

Kemandirian Muhammadiyah

Ahmad Syafi'i Ma'arif menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah memenuhi tiga ciri *civil society* yang dikonsepsi oleh Tocqueville tersebut, yaitu kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*). Muhammadiyah didirikan dan dibangun atas dasar kesukarelaan (*voluntary*), artinya memiliki pengurus dan anggota yang secara sukarela atau *ikhlas* membangun Muhammadiyah tanpa *profit* (keuntungan). Hal ini didasari oleh idealis warga Muhammadiyah yang menempatkan perjuangannya atas dasar dan tujuan dakwah dan ibadah, hanya semata-mata mengharap *ridha* dari Allah Swt. Untuk mewujudkan misi dakwah dan ibadahnya tersebut, Muhammadiyah mendirikan lahan aktualisasi pada amal usaha di berbagai bidang kehidupan, seperti sekolah, rumah sakit, panti santunan, dan lain-lain. Amal usaha tersebut dikelola secara swadaya (*self-generating*), dalam artian secara mandiri dimiliki dan dikelola oleh warga Muhammadiyah, sebagai aset bersama atas nama persyarikatan.

Muhammadiyah juga mampu sampai saat ini berdiri tegak secara swasembada (*self-generating*) menjadi bagian *interest group* dari pemerintah dalam ikut bagian membangun bangsa. Walaupun kerap mendapatkan subsidi pendidikan misalnya, namun Muhammadiyah juga mampu secara mandiri berdiri dari hasil amal usaha yang didirikan seperti rumah sakit dan sekolah serta perguruan tinggi, dan dari pemasukan kas, *infaq* serta *hibah* dari warga Muhammadiyah itu sendiri.³²

Kekuatan Pengimbang Negara

Konsep yang dijelaskan Tocqueville bahwa *civil society* adalah pengimbang negara, yaitu sebagai kekuatan kontrol terhadap jalannya pemerintahan agar berjalan stabil, telah ditunjukkan oleh Muhammadiyah melalui fungsi-fungsi pendidikan dan pemberdayaannya.

Ketua Umum Perwakilan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) Kawasan Timur, Salam Risyad, mengatakan bahwa sejak berdirinya Muhammadiyah telah banyak berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa melalui lembaga pendidikan yang didirikan.³³ Senada dengan Salam Risyad, Ahmad Syafi'i Ma'arif menjelaskan bahwa kontribusi dan komitmen Muhammadiyah dalam membangun bangsa ditunjukkan melalui upaya mempercepat kecerdasan, pencerahan keagamaan, dan komitmen kemanusiaan.³⁴ Kontribusi dan komitmen tersebut ditunjukkan Muhammadiyah melalui amal usaha yang didirikannya. Voll mengatakan;

³² Wawancara dengan Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif di Sahid Rich Sahid di Jl. Magelang No.8, Km 6, tanggal 28 November 2013, pukul 12.55 – 13.15 WIB.

³³ Wawancara dengan Salam Risyad, Ketua Umum Perwakilan Pimpinan Pusat Persis Kawasan Timur, di Kediaman Salam Risyad, tanggal 15 Februari 2014, pukul 21.46 WIB.

³⁴ Wawancara dengan Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Op.Cit.*.

“Muhammadiyah mendirikan sejumlah besar sekolah, pendidikan guru dan memiliki saran publikasi dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Sekolah-sekolah Muhammadiyah telah membantu mendidik kalangan nasionalis Indonesia, dan kegiatan-kegiatannya menentang perkembangan komunisme dan skulerisme radikal. Muhammadiyah terus berperan sebagai asosiasi yang aktif dalam bidang pendidikan dan sosial-budaya sepanjang era mencapai kemerdekaan.”³⁵

Keberadaan Muhammadiyah di Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan mengalami dinamika yang panjang dalam upaya mempertahankan kedudukannya agar bisa tetap hidup dalam menyebarkan dakwahnya ke lapisan masyarakat. Negara dan Muhammadiyah merupakan dua aktor penting yang tak terpisahkan. Di satu sisi Muhammadiyah membutuhkan negara sebagai salah satu lahan dakwahnya, dan untuk eksistensi dan pengakuan gerakan agar dapat tetap konsisten dan berkomitmen dalam menjalankan misi dakwahnya tersebut. Di sisi lain Negara juga membutuhkan Muhammadiyah sebagai kekuatan alternatif membangun masyarakat, bangsa dan negara, dan juga sebagai penyeimbang dan kontrol pemerintah. Hal inilah yang menurut Tocqueville, *civil society* tidak bisa lepas dari negara sebagai sebuah pembuat peraturan yang sah dan mengakui serta melindungi keberadaan masyarakat sipil.

Sikap yang diambil Muhammadiyah dalam menghadapi politik, khususnya politik praktis yang berkaitan dengan perjuangan kekuasaan, Muhammadiyah memiliki sikap menjaga jarak dan tidak terlibat, sedangkan dalam politik kebangsaan bersikap aktif sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah. Dalam beberapa poin kepribadiannya disebutkan, Muhammadiyah senantiasa mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah, dan bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana, membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT.³⁶

Upaya untuk mengeksistensikan gerakan dilakukan Muhammadiyah pertama kali dapat ditelusuri ketika berusaha mencari pengakuan badan hukum oleh pemerintahan Hindia Belanda, yang akhirnya Muhammadiyah mendapat pengesahannya setelah tiga bulan dari permohannya, tepatnya tanggal 3 Agustus 1920, dan ditetapkan melalui peraturan *belusuit* No.40.³⁷ Selanjutnya ketika Muhammadiyah bersikap Sikap kooperatif dan akomodatif dengan menerima subsidi dari pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Muhammadiyah kembali mengajukan permohonan pendirian perkumpulan agama secara sah pada tanggal 6 April 1943.³⁸ Pada masa Orde Lama, ada ancaman bahwa organisasi berbasis agama akan dibubarkan, banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah menarik diri dari keanggotaan Masyumi.³⁹ Pada awal masa Orde Baru, dalam melakukan eksistensi gerakan, Muhammadiyah kembali berusaha melobi Pemerintah untuk merehabilitasi Masyumi dengan cara menyampaikan nota kepada Pangdam Jaya tanggal 9 Mei 1966,

³⁵ Haedar Nashir, *Dinamika Politik Muhammadiyah, Op.Cit.*, hlm. 5

³⁶ Miftahulhaq, dkk, *Buku Pintar Anggota Muhammadiyah, Yogyakarta: LPCR PP Muhammadiyah*, 2013, hlm. 7

³⁷ Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006, Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2010, hlm. 84

³⁸ *Ibid*, hlm. 111.

³⁹ *Ibid*, hlm. 149-152.

walaupun akhirnya tidak mendapat restu dari Soeharto.⁴⁰ Begitu juga agar organisasi keormasan terbesar ke dua setelah NU ini tetap berdiri dan diakui kedudukan oleh pemerintahan Soeharto pada waktu itu, Muhammadiyah menerima asas tunggal Pancasila sebagai asas gerakan, walaupun secara implisit Muhammadiyah tetap beraqidah Islam.⁴¹ Pada masa reformasi halnya juga demikian, salah satunya adalah usaha Muhammadiyah memperjuangkan kedaulatan Ormas di Indonesia dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Maret 2013.⁴²

Sikap yang demikian dilakukan, karena Muhammadiyah meyakini bahwa untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya diperlukan aliansi dengan berbagai kalangan termasuk pemerintah, sehingga Muhammadiyah dapat kembali fokus pada aktivitas sosial kemasyarakatan. Menurut Peneliti ini adalah sikap antisipasi dan jalan moderat bagi Muhammadiyah untuk mempertahankan kedudukannya agar bisa tetap hidup dalam menyebarkan dakwahnya ke lapisan masyarakat.

Dimensi Kultural Muhammadiyah

Toqueville juga menekankan adanya dimensi kultural yang membuat *civil society* dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang, yakni keterikatan terhadap norma-norma dan nilai hukum yang diikuti warganya. Perjalanan panjang Muhammadiyah hingga saat ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kondisi dan situasi masyarakat dan negara pada saat berlangsungnya, yang mengharuskan Muhammadiyah bersifat fleksibel untuk mengambil tindakan dan arah dakwah yang jelas. Kondisi ini dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat dan negara tersebut, sehingga mengharuskan Muhammadiyah mengambil strategi-strategi dakwah yang berbeda pada setiap masa pemerintahan. Suwarno merincikan perbandingan strategi perjuangan Muhammadiyah untuk menelusuri sikap dan perilaku Muhammadiyah dari perspektif histori, yaitu kultural dan struktural.⁴³

Strategi kultural dapat dimaknai sebagai usaha memperjuangkan agar Islam tampil sebagai sumber etik dan moral serta landasan kultural dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan strategi struktural adalah usaha untuk mengartikulasikan Islam dalam bentuk simbol-simbol politik yang formal, seperti memperjuangkan sayariat atau negara Islam.⁴⁴ Untuk lebih jelasnya, perbedaan strategi kultural dan struktural dapat dibandingkan dalam tabel di bawah ini,

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 177-178.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 237-240

⁴² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pokok Pikiran dan Sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap RUU ORMAS*, Jakarta, 2013, hlm. 4.

⁴³ Suwarno, *Op.Cit.*, hlm. 18.

⁴⁴ *Ibid*.

Tabel. 7.1

Perbandingan Strategi Perjuangan Umat Islam Kultural dan Struktural⁴⁵

Indikator	Perbedaan Strategi	
	Kultural	Struktural
Ciri Pokok	Substansialis/Inklusif	Formalistik/Skipturalis/Ideologis
Sifat	Horizontal-kemasyarakatan	Vertikal elitis
Metode	Penyadaran dan <i>moral force</i>	Pemberdayaan dan aliansi
Arah/Tujuan/ Sasaran	Mempengaruhi perilaku sosial/cara berfikir masyarakat	Mempengaruhi/mengubah struktur (legislatif/eksekutif)
Sarana	Simposium, seminar, diskusi, ceramah, dakwah, lobi, penertiban, media massa, lembaga pendidikan	Saranan politik/struktur teknis berupa birokrasi, lembaga-lembaga negara, partai-partai, dan semua usaha yang mempengaruhi pada pengambilan keputusan publik.
Jangkauan	Titik berat pada individu untuk keperluan jangka panjang	Mobilisasi kolektivitas untuk keperluan jangka pendek.

Sumber: Suswarno, 2001;19.

Perjalanan Muhammadiyah dari fase ke fase pemerintahan memiliki orientasi yang berbeda. *Pertama*, orientasi Religius-Kultural (1912-1937), yaitu fokus strategi yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah kultural tetapi ruang geraknya adalah keagamaan (religius). Kisaran tahun 1912-1937 adalah usaha K.H. Ahmad Dahlan dan tokoh Muhammadiyah lainnya melakukan misi dakwah kultural keagamaan, misalnya memerangi praktik *syirik*, *tahayul*, *bid'ah*, dan *khurafat*, memerangi kebodohan dan keterbelakangan, serta usaha untuk menghalang kristenisasi oleh misi dan zending.⁴⁶

Kedua, orientasi Politis-Struktural (1937-1971), yaitu ruang gerak dakwah yang terfokus kepada strategi politik secara strukturalis. Strategi ini dimulai sejak kepemimpinan K.H. Mas Mansur, ditandai dengan insiasi Muhammadiyah untuk mendirikan gerakan politik, seperti MIAI dan PII, dilanjutkan dengan menentang kebijakan *saikerie* pada masa pendudukan jepang, melalui tokoh-tokohnya yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI terlibat dalam perumusan dasar negara, berpolitik praktis melalui anggota Istimewa Masyumi, dan terakhir mendirikan Parmusi pada awal masa Orde Baru.⁴⁷

Ketiga, orientasi Sosial-Kultural (1971-1995). Muhammadiyah kembali menggunakan strategi dasar, dakwah kultural yang orientasi gerakannya terfokus kepada bidang kemasyarakatan. Masa ini diawali dengan dikeluarkannya *khittah* Ujung Pandang 1971, yang mengharuskan Muhammadiyah mengambil sikap netral terhadap politik.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 21-22.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 28-41.

Muhammadiyah yang dipimpin oleh A.R. Fachruddun pada masa ini lebih terfokus kepada pengembangan amal usaha.⁴⁸

Keempat, orientasi Politis-Kultural (1995-1998). Muhammadiyah tetap menggunakan strategi kultural namun berorientasi politis dalam ruang geraknya. Pada masa ini Muhammadiyah berada dalam kepemimpinan Amien Rais, yang mengambil sikap oposisi dan kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Seperti penentangan Amien Rais tentang kebijakan 5 hari sekolah 2 hari libur, kebijakan penyeragaman sepatu sekolah, yang pada puncaknya mengkomandoi terjadinya reformasi 1998.⁴⁹

Fungsi Politik dalam Muhammadiyah

Tocqueville menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang (*checks and balances*) kekuatan negara, *civil society* memiliki fungsi politik. Gerakan sipil yang dilakukan bukan diprioritaskan pada pengambilalihan jabatan publik, tetapi melalui *engagement*, adanya kontrak sosial yang dilakukan dengan masyarakat dengan keyakinan bahwa kebaikan bersama dapat dipastikan melalui proses demokratis. Konsep ini di Muhammadiyah sendiri sering disebut *high politics* atau politik alokatif, yang secara rinci dijabarkan melalui Kepribadian Muhammadiyah dan *Khittah* Muhammadiyah.

Muhammadiyah Sebagai *civil society* dengan basis agama, yang bergerak pada ranah sosial keagamaan memiliki peran aktif dalam upaya membangun bangsa. Perannya sebagai organisasi kemasyarakatan tidak hanya terfokus kepada pada ranah sosial keagamaan saja, namun mencakup segala sapek kehidupan termasuk aspek politik. Fungsi politik Muhammadiyah dijelaskan dalam *khittah* Denpasar 2002;

“Muhammadiyah memilih perjuangan memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat madani (*civil society*) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.”⁵⁰

Muhammad Din Syamsuddin mengkategorisasikan politik Muhammadiyah sebagai “politik alokatif”, yaitu pola gerakan dengan cara mendistribusikan substansi nilai-nilai Islami ke dalam proses politik sebagai dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu usaha untuk mengajak manusia kepada kebenaran dan meninggalkan kemungkaran,⁵¹ dengan selalu aktif dan responsif dalam mempengaruhi dan memantau jalannya proses kebijakan dan pemerintahan, baik secara kelembagaan maupun melalui elite-elite Muhammadiyah itu sendiri. Konsep alokasi nilai ini bisa juga dikenal dengan *high politics*.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 41-48.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Poin ke 3 *Khittah* Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Denpasar 2002, dalam Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah...*, *Op.Cit.* hlm. 36-37.

⁵¹ Haedar Nashir, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, *Op.Cit.*, hlm. 105

Muhammadiyah memposisikan dirinya sebagai kelompok kepentingan (*interest group*),⁵² dan juga kelompok penekan (*pressure group*).⁵³ Berbeda dengan partai politik yang dalam mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mengajukan calon-calon untuk jabatan politik, kelompok kepentingan atau penekan lebih memilih cara yang persuasif dan bersifat propaganda dalam usaha mempengaruhi pemerintah.⁵⁴ Keberadaan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan oleh sebagian kalangan lebih efektif mewakili aspirasi rakyat, bila dibandingkan partai politik.⁵⁵

Pada dekade 1980-an, Prof. Dr. M. Amien Rais mengenalkan konsep *high politics*.⁵⁶ Dalam pandangannya, Muhammadiyah harus memainkan politik kualitas tinggi. *High politics* yang dimaksudkan adalah politik yang luhur, adiluhung dan berdimensi moral serta etis. Sedangkan lawannya adalah *low politics* atau politik tingkat rendah yang dapat diartikan politik yang terlalu praktis dan seringkali cenderung nista.⁵⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif menyempurnakan definisi *high politics*, yaitu politik yang mengabdikan kepada tujuan moral yang luhur, anggun sesuai dan sebangun dengan martabat dan harkat manusia beriman.⁵⁸ Ada tiga ciri dasar dari *high politics*, yaitu Amanah (*trust*), pertanggungjawaban (*accountability*), dan prinsip *ukhuwah* atau persaudaraan/persamaan (*brotherhood*).⁵⁹

Konsep *high politics* dalam Muhammadiyah ini dapat dijelaskan melalui Kepribadian Muhammadiyah,

“Muhammadiyah tidak buta politik, tidak takut politik, tetapi Muhammadiyah bukan organisasi politik. Muhammadiyah ataupun soal-soal politik yang mendesak-desak urusan agama Islam, maka Muhammadiyah akan bertindak menurut kemampuan, cara, dan irama Muhammadiyah sendiri.”⁶⁰

Sikap Muhammadiyah sejalan dengan *high politics* yang dapat diartikan dengan memposisikan dirinya untuk tidak terlibat dalam politik praktis, namun dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti memerangi korupsi, mengajak masyarakat luas untuk memerangi ketidakadilan, menghimbau pemerintah untuk terus membangun demokrasi dan keterbukaan, dan sebaliknya menghindari Muhammadiyah dari manuver-manuver politik untuk memperebutkan kursi DPR, meminta bagian di lembaga eksekutif, membuat penekan, dan usaha untuk mempertahankan dan memperluas *vasted interest*.⁶¹

⁵² *Ibid.*, hlm. 33.

⁵³ Syarifuddin Jurdi, *Op.Cit.*, hlm. 33.

⁵⁴ Ichlasul Amal, *Teori Mukhtahir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996, hlm. xvii.

⁵⁵ Syarifuddin Jurdi, *Op.Cit.*, hlm. 212.

⁵⁶ Gagasan *high politics* pertama kali muncul pada 13 Oktober 1968 berawal dari analisis Amien Rais mengenai perkembangan kehidupan politik nasional dalam seminar bulanan yang diadakan oleh Laboratorium Dakwah Yayasan Shalahuddin Yogyakarta, dalam Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Opisi...*, *Op.Cit.*, hlm. 86.

⁵⁷ Amien Rais, *High Politics*, dalam Kuntowijoyo dkk, *Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru*, Bandung; Mizan, 1995, hlm. 74.

⁵⁸ Suwarno, *Op.Cit.*, hlm. 88

⁵⁹ Amien Rais, *Hubungan Antara Politik dan Dakwah; Berguru Kepada Muhammad Natsir*, Bandung: Mujahid, 2004, hlm. 10-13.

⁶⁰ PP Muhammadiyah Majelis Pustaka, *Sejarah Muhammadiyah*, (PW- Muhammadiyah Lampung, 1996), hlm 6, dalam Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam...*, *Op.Cit.*, hlm. 210.

⁶¹ Amien Rais, *High Politics*, *Op.Cit.*, hlm. 74.

Salah satu identitas gerakan Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar*. Prinsip dakwah untuk menyeruh kepada kebaikan atau kebenaran dan mencegah kepada keburukan atau kejelekan, merupakan prinsip yang dipegang oleh Muhammadiyah. Oleh karenanya, dakwah yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan semata, tetapi mengandung makna-makna politik. Dalam lingkungannya dakwah tidak hanya berada dalam ranah keagamaan, sosial kemasyarakatan, atau pendidikan semata, tetapi juga dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dakwah tidak hanya ditujukan kepada tataran masyarakat umum atau wilayah kultural yang “murni”, namun juga pada tataran pemerintahan, negara, politik dan birokrasi, bahkan mencakup semua aspek kehidupan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam “*Khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*”, Denpasar 2012;

“Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma;ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadilan.”⁶²

Menurut Syarifuddin Jurdi, pilihan untuk terlibat dalam kegiatan politik merupakan konsekuensi logis dari pemahaman keagamaan yang bersifat integratif.⁶³ Relasi sosial politik dengan berbagai lembaga dan sikap maupun responnya terhadap dinamika politik dilakukan Muhammadiyah untuk mencapai cita-cita sosialnya. Tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya dapat tercapai dengan memaksimalkan seluruh sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk politik.

“Muhammadiyah menyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (*al umur ad duniawiyat*) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalin kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.”⁶⁴

Ahmad Syafi'i Ma'arif memberikan alasan kenapa Muhammadiyah harus terlibat dan aktif dalam proses politiknya membangun bangsa, dalam pernyataan dijelaskan;

“Muhammadiyah dituntut untuk terlibat aktif dalam proses kehidupan sosial politik bangsa, keterlibatan aktif tersebut merupakan keharusan sejarah, bagaimanapun Muhammadiyah telah berpartisipasi aktif jauh sebelum Indonesia merdeka. Peran sosio-politiknya ditunggu banyak pihak, khususnya dalam membangun moral dan etika politik. Moralitas dalam politik Indonesia hampir punah dalam politik elite-elite berkuasa, elite berkuasa semakin jauh dari aspirasi masyarakat dan kehidupan elite berkuasa terus menunjukkan kemewahan dan kemegahan di tengah masyarakat luas. Tugas Muhammadiyah dengan konsep kadernya tersebut dapat

⁶² Poin 5 *Khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Denpasar 2012, dalam Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah...*, *Op.Cit.*, hlm. 37.

⁶³ Syarifuddin Jurdi, *Op.Cit.*, hlm. 97.

⁶⁴ Poin 1 *Khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Denpasar 2012, dalam Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah...*, *Op.Cit.*, hlm. 36.

memberikan kontribusi bagi pembangunan politik Indonesia yang beradab, bermoral dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Muhammadiyah harus mengembangkan gagasan politik yang prospektif bagi konstruksi Indonesia yang beradab serta kader yang memiliki visi kemanusiaan, keindonesiaan dan kebangsaan.”⁶⁵

Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) mempunyai tugas besar untuk permasalahan bangsa ini. Isu aktual dalam perpolitikan Indonesia pada kejatuhan Orde Baru misalnya masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dominasi kepemilikan aset bangsa oleh asing, dan berbagai konflik yang terjadi. Muhammadiyah yang memiliki misi dakwah yang jelas tidak bisa hanya melihat bahkan diam ketika terjadi masalah-masalah yang merugikan bangsa dan negara. Muhammadiyah melalui peran politiknya harus memainkan peran aktif dalam membangun bangsa yang lebih baik.

“Muhammadiyah menyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan kemasyarakatan, pada dasarnya adalah wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai *Ilahiah* melandasi dan tumbuh subur bersama dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan, dan kedaban untuk terwujudnya “*Baldatuh Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*.”⁶⁶

Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan suatu keniscayaan terlepas dari pergulatan politik, lebih-lebih ini menyangkutkan kemaslahatan umat. Walaupun Muhammadiyah tidak didesain untuk mengurus masalah kenegaraan atau politik, tetapi Muhammadiyah memiliki kewajiban untuk memperbaiki bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berkemajuan. Hal yang terpenting untuk dilakukan oleh Muhammadiyah adalah menjalankan misi dan nilai-nilai Islam untuk mewarnai perpolitik nasional. Oleh karenanya, perjalanan panjang Muhammadiyah dari masa penjajahan Hindia Belanda hingga saat ini patut diketahui, sehingga dapat diketahui begitu penting dan *urgent*-nya Muhammadiyah untuk terlibat dalam perpolitik nasional dalam upaya menyelamatkan bangsa dan negara.

Usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan selalu aktif mengawal jalannya proses kebijakan negara, disebabkan karena Muhammadiyah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen bangsa. Oleh karena itu, Muhammadiyah sangat peduli atas tegaknya kedaulatan negara dan kebutuhan bangsa yang nampaknya semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan negara yang demokratis, berkemakmuran, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat.⁶⁷

Perjalanan Muhammadiyah sejak kelahirannya, terlebih-lebih semenjak dikeluarkannya *Khittah* Ujung Pandang 1971,⁶⁸ yang menjelaskan secara tekstual dan terperinci bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang

⁶⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, Potret Politik Muhammadiyah, dalam Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam...*, *Op.Cit.*, hlm. xx-xxi

⁶⁶ Poin 2 *Khittah* Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Denpasar 2012, dalam Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah...*, *Op.Cit.*, hlm. 36.

⁶⁷ Laporan Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015, hlm. 182-183.

⁶⁸ Lihat Subbab *Khittah Muhammadiyah tentang Politik* pada Bab IV, halaman 82-83.

tidak secara praktis dan aktif terlibat dalam ranah politik kekuasaan, harus dilihat dan dianalisis lebih dalam. Komitmen untuk selalu menjalankan prinsip *khittah*-nya tersebut dan dalam menjalankan fungsi politiknya, berupa politik nilai atau politik alokatif, yang senantiasa mengamalkan *high politics* tidaklah berjalan mulus, terutama pada masa reformasi pada saat ini. Misalnya, lahirnya PAN (Partai Amanat Nasional) yang memiliki hubungan secara historis dengan Muhammadiyah, sebab tidak sedikit warga Muhammadiyah adalah pendiri dan kader-kader PAN itu sendiri. Selain itu juga dalam aksi dukung-mendukung yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah ketika Pemilihan Presiden tahun 2004, serta keterlibatan para petinggi Muhammadiyah yang berkontribusi mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB) dan keikutsertaannya pada Pemilu 2009.

Persentuhan Muhammadiyah dengan PAN sendiri bermula dari amanat Tanwir Semarang yang mengharuskan persyarikatan untuk melakukan *ijtihad politik*. Hal ini dimaksudkan Muhammadiyah dalam membangun dan menyusun agenda reformasi, sebagai tuntutan zaman dalam ber-*amar ma'ruf nahi mungkar*.⁶⁹ Atas sikap ini, Amien Rais melakukan *ijtihad politik* dan mendirikan PAN. Oleh karenanya, A.M. Fatwa menyebutkan bahwa PAN merupakan hasil proses *ijtihad politik* Tanwir Muhammadiyah di Semarang.⁷⁰ Pradana Boy menyebutkan, “selama ini, secara “tradisional”, politik Muhammadiyah umumnya selalu dihubungkan dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Karena dalam waktu yang cukup lama, dan masih berlangsung hingga hari ini, PAN merupakan “rumah politik” bagi warga Muhammadiyah”.⁷¹

Namun demikian dapat dikatakan hubungan Muhammadiyah dan PAN hanyalah sebatas hubungan historis, dan politis dengan Sidang Tanwir Semarang, bukan pada hubungan struktural organisatoris. Dalam hal ini Amien Rais menegaskan, bahwa PAN adalah *ijtihad politik* dirinya dan beberapa orang yang setuju dengan plat-form PAN, bukan *ijtihad* Muhammadiyah, karena itu, warga Muhammadiyah dibebaskan untuk menentukan sikapnya, apakah mendukung PAN atau tidak.⁷²

Namun, pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2004, Muhammadiyah menunjukkan sikap partisipannya atau memberikan sinyal kepada warganya untuk memilih PAN. Rapat Pleno PP Muhammadiyah mengeluarkan seruan agar memilih partai yang memberi peluang bagi terpilihnya kader-kader Muhammadiyah serta instruksi memilih calon DPD yang direkomendasikan oleh Muhammadiyah.⁷³

Pandangan tradisional yang menganggap PAN adalah rumah bagi warga Muhammadiyah, mengalami tantangan yang cukup serius, karena dari rahim yang sama telah lahir Partai Matahari Bangsa (PMB), yang secara ideologis sama-sama menginduk kepada Muhammadiyah.⁷⁴ PMB lahir akibat respon dari Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) atas kekecewaannya terhadap PAN, karena dianggap kurang mampu membawa

⁶⁹ Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Semarang 5-7 Juli 1998, Yogyakarta; Majelis Pustaka dan Dokumentasi PP Muhammadiyah, 200, hlm. 57, dalam Syarifuddin Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 399.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 401

⁷¹ Pradana Boy, *PAN, PMB, Muhammadiyah, dan Pemilu 2009* (Artikel), Malang. 2009, hlm. 1.

⁷² Syarifuddin Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 399-401.

⁷³ Risalah Keputusan Sidang Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bersama Ketua-Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tentang “*Kebijakan Muhammadiyah Menghadapi Pemilu 2004*”, tanggal 9-10 Februari 2004 M/18-19 Dzulhijjah 1424 H; lihat pemuatan dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 05 Th ke-89, tanggal 1-15 Maret 2005M/10-25 Muharram 1425 H. Dalam Syarifuddin Jurdi, *Ibid*, hlm. 404.

⁷⁴ Pradana Boy, *Op.Cit.*, hlm. 1.

aspirasi Muhammadiyah. Partai Matahari Bangsa (PMB) yang resmi didirikan pada tanggal 16 Desember 2006, dengan Ketua Umumnya, Imam Addaruqutni.⁷⁵ Namun akhirnya, PMB yang dimaksudkan menjadi medan juang penyampai aspirasi Muhammadiyah tidak dapat berbicara banyak dalam struktur kekuasaan (DPR), setelah pada Pemilu 2009 hanya memperoleh 0,40 % (415.294) suara dan tidak mendapatkan jatah kursi di parlemen.⁷⁶

Sama seperti halnya dengan PAN, PMB juga memiliki hubungan secara politis dan historis dengan Muhammadiyah, namun bukan kepada hubungan secara struktur organisatoris. Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Sholeh Marsudi tentang “Prilaku Politik Praktis Din Syamsuddin dalam Perspektif *Khittah* Muhammadiyah”, prilaku politik praktis yang dilakukan oleh Din Syamsuddin dan elite Muhammadiyah lainnya adalah merupakan peran individual, yang sangat erat kaitannya dengan kelembagaan yang dipimpinya yaitu Muhammadiyah, sebab Muhammadiyah secara kelembagaan menolak prilaku politik praktis yang dilakukan oleh kadernya dengan membawa-bawa nama Muhammadiyah.⁷⁷

Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik praktis juga sangat terlihat ketika proses aksi dukung-mendukung yang dilakukan oleh Muhammadiyah terhadap pasangan Amien Rais dan Siswono pada Pilpres 2004. Hal ini dapat terlihat dalam sidang Pleno yang diperluas yang diadakan pada 9-10 Februari 2004 di Yogyakarta, dengan mengambil keputusan,

“*Pertama*, mendukung sepenuhnya langkah Prof. Dr. H.M. Amien Rais selaku kader terbaik dan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta tokoh reformasi untuk memperjuangkan kelanjutan reformasi dan penyelamatan bangsa dalam pemilihan presiden pada pemilu 2004. *Kedua*, Presiden Indonesia yang diharapkan terpilih dalam pemilu 2004 untuk memperjuangkan kelanjutan reformasi, bersih dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), yang menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik, memiliki visi kebangsaan yang luas, tegas dan berwibawa dalam membawa bangsa ke tengah pergaulan internasional, mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memajukan kehidupan bangsa menuju ke masa depan yang lebih baik. *Ketiga*, meminta kepada warga Muhammadiyah dan mengajak kepada masyarakat untuk mendukung terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang dapat mengemban amanat reformasi serta penyelamatan bangsa.”⁷⁸

Menurut Mutohharun, Pilpres 2004 telah “menyeret” Muhammadiyah menjadi “mesin politik” yang bermuara pada pragmatisme politik.⁷⁹ Bahkan dalam wawancara penulis dengan Ahmad Syafi’i Ma’arif, beliau mengakui bahwa politik dukung-mendukung Muhammadiyah terhadap putra terbaiknya pada Pilpres 2004 disebutkan

⁷⁵ Dilansir dari laman web: <http://news.detik.com/read/2008/12/27/045823/1059849/709/partai-matahari-bangsa--18-, 30/06/2014. 06.05 WIB>.

⁷⁶ Dilansir dari laman web: http://bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=34¬ab=4, 30/06/2014, 06.07 WIB.

⁷⁷ M. Sholeh Marsudi, *Op. Cit.*, hlm. 102.

⁷⁸ Sidang Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Kebijakan Muhammadiyah menghadapi Pemilu 2004, *Ibid.*, dan dalam Syarifuddin Jurdi, *Op. Cit.*, hlm. 445.

⁷⁹ Mutoharrun Jinan, *Muhammadiyah dalam Bayang-Bayang Politik Praktis*, dalam Media Indonesia, Jum’at, 30 April 2004, hlm 15.

sebagai sebuah penyimpangan yang disepakati bersama antara Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah terhadap *khittah* Ujung Pandang 1971 yang dipertegas dengan *Khittah* Denpasar 2002. Hal ini menurutnya adalah kondisi darurat yang harus dilakukan Muhammadiyah dalam ikut memperjuangkan jalannya reformasi pada waktu itu.⁸⁰

Terlepas dari kebutuhan bangsa pada kondisi dan situasi pada saat itu, sikap politik yang diambil Muhammadiyah dalam melibatkan diri dalam Pemilu 2004, menurut peneliti telah keluar dari *khittah* perjuangannya. Karena, komitmen *Khittah* Denpasar 2002, menjelaskan bahwa dalam menjalankan peran politik kebangsaannya Muhammadiyah tidak harus berhubungan dan berhimpitan dengan partai politik. Muhammadiyah telah terjebak pada ranah politik praktis, dan politik dukung-mendukung. Jika misalnya tidak secara tersurat Muhammadiyah menyuarakan untuk megarahkan warganya memilih pasangan Amien Rais sebagai Presiden pada pilpres 2004, secara otomotis warga Muhammadiyah pasti tahu dan akan secara cerdas memilih calon pasangan presiden yang berasal dari kader persyarikatannya tersebut.

Muhammadiyah memasuki usianya yang kedua abad saat ini, dimulai pada Muktamar Muhammadiyah ke-46 tahun 2010 hingga menjelang Pemilu dan Pilpres 2014 juga mengalami berbagai dinamika politik.

“Meskipun organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan bukanlah organisasi politik, tetapi proses-proses politik yang berlangsung pada tingkat kenegaraan selalu memberikan pengaruh bagi eksistensi ormas-ormas keagamaan. Sebagai salah satu ormas Islam, kenyataan itu juga bukan pengecualian bagi Muhammadiyah. Dari waktu ke waktu dinamika politik selalu memberikan pengaruh kepada Muhammadiyah, baik positif maupun negatif.”⁸¹

Dinamika politik yang terjadi berupa manuver-manuver yang coba dilakukan oleh elite-elite Muhammadiyah itu sendiri, yang secara tidak langsung telah menggoyahkan prinsip *khittah* dan *high politics* yang coba dijalankan oleh Muhammadiyah. Dinamika politik ini tidak lagi dilakukan secara kelembagaan terstruktur atas instruksi PP Muhammadiyah, karena diketahui Ketua Umum Din Syamsuddin berulang kali menyatakan bahwa Muhammadiyah bersifat netral dan selalu mengedepankan politik adiluhung, serta tidak mengarahkan dan membebaskan warganya untuk memilih partai politik atau pun calon presiden tertentu.⁸² Namun dinamika politik yang terjadi malah dilakukan oleh elite-elite Muhammadiyah itu sendiri yang coba membawa-bawa nama Muhammadiyah.

Dinamika politik yang terjadi misalnya yang dialami kepada ketua umum terpilih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat periode 2010-2015, yang akhirnya atas intruksi PP Muhammadiyah membatalkan ketua umum terpilih dengan menggantikan calon yang memperoleh suara terbesar di bawahnya. Hal ini dilakukan karena yang

⁸⁰ Wawancara dengan Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif di Sahid Rich Sahid di Jl. Magelang No.8, Km 6. Pukul MA 12.55 – 13.15 WIB.

⁸¹ Pradana Boy, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁸² Dilansir dari laman web: <http://news.detik.com/read/2014/05/17/155548/2584751/1562/sikap-din-syamsuddin-yang-kedepankan-politik-adiluhung-dipuji?n992204fksberita>, 27/08/14, 17.54 WIB. dan dari laman web: <http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2050251/din-tak-arahkan-warga-muhammadiyah-ke-capres-tertentu>, 27/08/14, 17.55 WIB.

bersangkutan telah terbukti melakukan gerakan politis, yaitu dengan membawa-bawa massa menggunakan partai politik tertentu.⁸³

Fenomena seperti itu jelas tidak ditolerir oleh PP Muhammadiyah, karena selain Muhammadiyah adalah organisasi keislaman yang menjunjung tinggi Alqur'an dan Sunnah, menciptakan masyarakat Islam yang utama adalah tujuan dakwahnya, dan juga jelas hal ini membawa citra buruk bagi Muhammadiyah itu sendiri. Sikap membawa massa dengan menggunakan basis partai politik untuk memenangkan suatu jabatan, bukanlah ciri dari yang diajarkan oleh Islam dan bukan dari ciri kepribadian dan *khittah* Muhammadiyah.

“Muhammadiyah menyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (*al umur ad duniawiyat*) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalin kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.”⁸⁴

Gerakan yang terkesan politis juga terjadi ketika Tabligh Akbar yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang dengan menghadirkan pembicara tunggal mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. M. Amien Rais, MA. Tabligh Akbar ini juga dihadiri oleh undangan yang terdiri dari Pimpinan Muhammadiyah, Aisyiyah dan organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Dalam hal ini Amien Rais menyampaikan pidatonya tentang kondisi bangsa dan eksploitasi barat terhadap sumber daya Alam di Indonesia.⁸⁵ Hal yang mengejutkan ketika pada sesi penutup, Amien Rais mengundang seluruh kader muda Muhammadiyah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk naik ke atas panggung untuk mempromosikan diri.

Reaksi pun datang dari berbagai kalangan, seperti yang dikatakan oleh Dr. EM. Sangadji, Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, mengatakan akibat peristiwa tersebut banyak dari para aktivis muda Muhammadiyah yang berasal dari berbagai partai politik menyatakan keberatannya dan protes ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Misalnya protes yang dilakukan Muqqoddas Murtado dari Partai Bulan Bintang (PBB), Ahsan Ismail dari Partai Golongan Karya (Golkar), Ihtibar Atamaja dari Partai Hanura, dan dari aktivis politik PKS.⁸⁶

Secara lisan aktivis-aktivis tersebut mengeluhkan sikap yang diambil oleh Amien Rais, bahkan ada yang mengatakan “Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang dibayar berapa oleh PAN”, sebab calon anggota legislatif yang berasal kader

⁸³ Wawancara dengan Bapak Thohir Luth, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Sekretariat PPA, Gedung Rektorat Universitas Brawijaya lt. 5, tanggal 26 Agustus 2014, pukul 12.30 WIB.

⁸⁴ Poin 1 *Khittah* Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Denpasar 2012, dalam Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah...*, *Op.Cit.*, hlm. 36.

⁸⁵ Diisampaikan pada Tabligh Akbar yang bertajuk Silaturahmi dan Pengajian Umum Keluarga Besar Muhammadiyah Malang Raya di UMM DOM pada tanggal 1 September 2013.

⁸⁶ Wawancara dengan Dr. EM. Sangadji, Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, di Kantor Kepala Sekolah Yayasan Ahmad Yani Malang, pada tanggal 18 Agustus 2014, pukul 12.15 WIB.

Muhammadiyah yang naik ke atas panggung pada waktu Tabligh Akbar tersebut adalah kader-kader dari PAN. EM Sangadji mengatakan, bahwa Muqaddas Murtado menyayangkan ketika Muhammadiyah dijadikan basis dukungan partai politik, yang akhirnya membuat citra dan berjalannya organisasi tidak baik, sebab pada dasarnya Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam, yang tidak dibenarkan melakukan aksi dukung-mendukung secara politis, namun warganya dibebaskan untuk berpolitik karena itu hak dan kebebasan sebagai warga negara.⁸⁷

Atas insiden tersebut pihak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, memberikan klarifikasi kepada para aktivis-aktivis politik tersebut, dan menjelaskan bahwa tindakan tersebut bukan berasal dari instruksi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, namun murni tindakan Amien Rais, yang mereka sendiri mengatakan terkejut akan kejadian tersebut. Selanjutnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang secara lisan telah menegur Amien Rais, dan berjanji tidak akan mengulang kesalahan dengan tidak mengundang kembali tokoh Muhammadiyah yang sama.⁸⁸

Kejadian yang hampir sama juga dilakukan Amien Rais ketika Tanwir Muhammadiyah di Samarinda pada tanggal 24 Mei 2014. Dalam hal ini, mantan ketua MPR RI dan mantan ketua umum Muhammadiyah tersebut sengaja diundang untuk menyambut kedatangan calon presiden pada pilpres 2014. Calon presiden Jokowi datang terlebih dahulu pukul 08.00 WITA, dan selanjutnya calon presiden Prabowo Subianto tiba setelahnya pukul 12.00 WITA.⁸⁹ Kedua pasangan calon tersebut dihadirkan untuk memaparkan visi dan misi mereka sebagai calon presiden kepada warga Muhammadiyah. Namun Amien Rais yang termasuk tokoh yang sangat dihormati di Muhammadiyah melakukan teriakan dan yel-yel “nomor satu” kepada warga Muhammadiyah yang hadir pada sidang Tanwir saat itu untuk menyambut kedatangan Prabowo, dan dalam sambutannya dia juga mengklaim bahwa 80% warga Muhammadiyah mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Tindakan yang dianggap tidak mengindahkan etika organisasi ini pun mendapat reaksi mengejutkan dari para PP Muhammadiyah.⁹⁰

Prof. Dr. Thohir Luth, Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang juga hadir dalam sidang Tanwir Samarinda, mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Amien Rais malah mencederai kewibawaan tokoh reformasi itu sendiri. Teriakan “nomor satu” Amien Rais membuat warga Muhammadiyah bahkan tidak tertarik. Thohir Luth juga mengatakan saat ini Amien Rais sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan oleh warga Muhammadiyah, dan hal itu adalah sanksi moral yang didapatnya, karena telah membawa-bawa gerbong politik dalam persyarikatan.⁹¹

Semua ini dapat dilihat tidak mudanya “menggiring” Muhammadiyah yang selama ini dikenal sebagai mesin sosial menjadi mesin politik. Sehingga “menyeret-nyeret” Muhammadiyah ke dalam kancah politik dengan sendirinya akan berhadapan dengan benteng kultural yang sebenarnya masih cukup kuat di kalangan Muhammadiyah.

⁸⁷ Wawancara dengan Dr. EM Sangadji, *Ibid.*

⁸⁸ Wawancara dengan Dr. EM Sangadji, *Ibid.*

⁸⁹ Dilansir dari laman web: <http://news.detik.com/read/2014/05/24/073311/2591373/1562/datang-ke-tanwir-muhammadiyah-jokowi-salaman-dengan-amien-rais?992204topnews>, 27/08/2014, pukul 23.09 WIB dan dari laman web: <http://news.detik.com/read/2014/05/24/113417/2591434/1562/tiba-di-tanwir-muhammadiyah-prabowo-disambut-takbir>, 27/08/14, pukul 23.10 WIB.

⁹⁰ Wawancara dengan Prof. Dr. Thohir Luth, *Op.Cit*

⁹¹ Wawancara dengan Prof. Dr. Thohir Luth, *Ibid.*

Tentunya jika ditelusuri lebih dalam, gerakan-gerakan yang bersifat politis yang dilakukan oleh elite-elite Muhammadiyah dengan membawa-bawa Muhammadiyah sebagai basis massa politik kerap dijumpai di berbagai daerah yang lain di Indonesia. Namun gerakan dan tindakan politik yang dilakukan oleh elite-elite Muhammadiyah tersebut tidak pula langsung dapat dikatakan sebagai keputusan atau tindakan yang dilakukan persyarikatan Muhammadiyah secara kelembagaan. Karena perlu dibedakan antara tindakan individu dan keputusan persyarikatan. Tindakan Amien Rais misalnya dalam melakukan manuver politik, adalah murni inisiatif Amien Rais sendiri sebagai hak individunya untuk bersuara, dan bukan berarti tindakan Amien Rais yang secara kebetulan sebagai warga Muhammadiyah dapat dikatakan pula sebagai tindakan persyarikatan Muhammadiyah. Dikarenakan penyampainnya yang dilakukan Amien Rais bukanlah suara persyarikatan secara resmi melalui hasil musyawarah, selanjutnya Amien Rais juga saat ini tidak termasuk dalam struktur kepemimpinan Pusat Muhammadiyah. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan Muhammadiyah tetap menjalankan gerakan politik sesuai kepribadian dan *khittah*-nya, namun bagaimana pun juga tidak dibenarkan bagi warganya membawa-bawa Muhammadiyah sebagai basis kelompok politik dalam aksi dukung mendukung, karena hal tersebut bukan cerminan dari *high politics* atau politik nilai yang adiluhung dan berjiwa luhur.

Gerakan politik yang dilakukan Muhammadiyah sebenarnya adalah gerakan moral, bukan sebagai gerakan politik yang bersifat praktis, dukung-mendukung, meminta jabatan, bahkan menyebabkan Muhammadiyah menjadikan basis massa terhadap suatu golongan, kelompok atau partai politik tertentu. Gerakan moral inilah yang dikembangkan oleh lembaga yang khusus menangani masalah politik, yaitu Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Sebagai gerakan dakwah, sudah seharusnya bagi warga Muhammadiyah melakukan kegiatan yang berfokus bagi pengembangan keislaman dan kegiatan sosial, dan tidak harus sibuk mengurus masalah politik yang bersifat pragmatis.

AKTUALISASI PERAN POLITIK KEBANGSAAN MUHAMMADIYAH 2010-2014

Banyak tantangan bagi Muhammadiyah dalam usianya di abad kedua. Tidak hanya untuk bertahan dalam zaman yang terus berubah secara cepat. Tetapi, lebih-lebih lagi untuk meningkatkan peran dan kontribusinya bagi Indonesia. lebih jauh lagi, bagi masyarakat internasional. Muhammadiyah dengan segala pencapaiannya sepanjang satu abad silam berada dalam posisi yang tepat dan pantas untuk meningkatkan kontribusinya kepada warga negara-bangsa Indonesia dan dunia global.⁹²

Sebagai sebuah *civil society* yang memiliki fungsi dan kekuatan politik, sebagaimana konsep yang dijelaskan oleh Alexis de Tocqueville, yaitu sebagai kekuatan pengimbang negara. Tentunya Muhammadiyah dapat dijadikan kekuatan alternatif yang mewakili organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan pemikir Islam mampu memperjuangkan nilai-nilai keislaman dalam memperjuangkan kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara. Oleh karena, dalam kepemimpinan Din Syamsuddin, memiliki komitmen untuk membangun visi dan karakter bangsa sebagai ikhtiar menindaklanjuti dan meluruskan kembali reformasi sesuai cita-cita kemerdekaan tahun 1945.

⁹² Suara Muhammadiyah 02 / 98 | 16-31 Januari 2013/4-19 Rabiulawal 1434 H., hlm. 7

Peneliti dapat menyimpulkan dari agenda Muhammadiyah abad kedua yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, mulai dari visi jangka menengah (2010-2015), Prioritas Pengembangan, Program Partisipasi Kebangsaan dari Program Umum 2010-2015, Program pengembangan dari Program Partisipasi Kebangsaan, Aksi dan Pelayanan dari Ciri Pengembangan, serta Program Bidang Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, dan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Program Khusus Perbidang, dapat disimpulkan bahwa targetan yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah dalam mengaktualisasi peran kebangsaannya dalam bidang politik di awal abad kedua adalah; *Pertama*, meningkatkan pemberdayaan, pembinaan, pengembangan dan pendidikan politik. *Kedua*, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi kebangsaan terhadap persoalan aktual dan isu-isu kontemporer kebangsaan. *Ketiga*, memperkuat jaringan, komunikasi dan hubungan antar organisasi dan lembaga pemerintahan. *Keempat*, meningkatkan fungsi advokasi berupa aksi dan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat.

1. Meningkatkan Pemberdayaan, Pembinaan, Pengembangan dan Pendidikan Politik

Berbicara tentang pendidikan politik, Haedar Nashir menjelaskan bahwa sebenarnya Muhammadiyah telah melakukannya melalui angkatan-angkatan mudanya yang terhimpun dalam organisasi otonomnya (ortom), seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Nasyiatul Aisyiah (NA), dan Pemuda Muhammadiyah (PM).⁹³ Fida Aifif, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (DPP IMM), menjelaskan bahwa proses eleksi kepemimpinan dalam IPM, mulai dari proses musyawarah, penyampaian aspirasi, memilih pemimpin, penetapan jabatan, dan lain-lain, kesemuanya merupakan proses pembelajaran bagi angkatan muda IPM untuk berpolitik dan berdemokrasi.⁹⁴

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah (DPP NA), Norma Asri, SH., M.Hum., menurutnya NA senantiasa mendorong kadernya untuk berpolitik. Dorongan berpolitik yang dimaksud adalah pemahaman dan kesadaran politik bagi kadernya, melalui kegiatan-kegiatan seperti pendidikan pemilihan cerdas, peningkatan kapasitas caleg perempuan, serta mendorong kadernya untuk berpartisipasi praktis, seperti terlibat dalam panitia seleksi dan penyelenggara Pemilu.⁹⁵

Dalam merealisasikan visi dalam membangun karakter bangsa tersebut di abad kedua, Muhammadiyah menguatkan sistem gerakan yang lebih maju, profesional dan modern dengan melakukan dan mengintensifkan kegiatan-kegiatan diskusi keumatan dalam menindaklanjuti isu-isu strategis serta kebijakan nasional yang menyangkut hidup rakyat. Melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammadiyah mengambil sikap dalam menghadapi persoalan bangsa dan negara tersebut diwujudkan antara lain; melakukan diskusi dan rapat terbatas yang dilakukan dua mingguan dan bulanan (minggu kedua dan minggu terakhir) dengan

⁹³ Wawancara dengan Dr. Haedar Nashir, di Kediaman Haedar Nashir, Palem, Taman Tiirtu Utara, Kasihan, Bantul, pada tanggal 12 Desember 2013, pukul 10.10 WIB.

⁹⁴ Wawancara dengan Ketua Umum DPP IPM, Fida Afif di Kantor DPP IPM di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jalan, K.H. Ahmad Dahlan, Yogyakarta, tanggal 27 November 2013, pukul. 12.15 WIB.

⁹⁵ Wawancara dengan Ketua Umum DPP Nasyiatul Aisyiah, Norma Asri, SH, M.Hum, di Sekretariat DPP IPM di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jalan, K.H. Ahmad Dahlan, Yogyakarta, tanggal 27 November 2013, pukul 17.00 WIB.

menghadirkan Anggota LHKP, membahas sikap LHKP tentang isu-isu kontemporer dan kebijakan publik yang berkembang.⁹⁶

Usaha yang dilakukan LHKP misalnya menerbitkan Jurnal HIKMAH sebagai wadah aspirasi dan penyalur warga Muhammadiyah tentang pemikiran-pemikiran politik,⁹⁷ dan memperluas pendidikan kewarganegaraan (*civil education*) yang selama ini dikembangkan di berbagai Universitas Muhammadiyah.⁹⁸ Usaha lain yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam memberikan pendidikan politik adalah dengan turun ke daerah dalam memberikan pemahaman kebangsaan, salah satunya adalah sebagai narasumber pada kegiatan Rapat Kerja Perumusan Modul Pelatihan Kader Politik Kebangsaan Muhammadiyah yang dilaksanakan LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan pada tanggal 25-27 Desember 2012.⁹⁹

Guna menambah wawasan politik kadernya, Muhammadiyah mengirimkan delegasi/peserta utusan LHKP pada *Workshop International* dengan tema “*Youth and Politics*” dengan penyelenggara *Konrad Adenauer School for Young Politicians* (KASYP), tanggal 27-29 Mei 2013 di Singapura.¹⁰⁰ Menjelang Pemilu 2014, Muhammadiyah juga melakukan pembekalan dan pembelajaran serta membuka ruang diskusi bagi para calon legislatif (caleg) serta kader muda Muhammadiyah dalam strategi pemenangan Pemilu 2014, yaitu dengan mengadakan diskusi publik bertepatan “Penguatan Kader Politik Angkatan Muda Muhammadiyah dan Strategi Pemenangan Pemilu 2014” pada tanggal 04 April 2014.¹⁰¹

2. Meningkatkan Keterlibatan dan Partisipasi Kebangsaan Terhadap Persoalan Aktual dan Isu-Isu Kontemporer Kebangsaan

Muhammadiyah dalam menindaklanjuti isu-isu politik dan kebijakan publik kontemporer misalnya menindak lanjuti paham Syi’ah yang gencar dibicarakan pada tahun 2012 yaitu dengan mengadakan Diskusi Publik “Dialog antar mazhab; Konstruksi Relasi Sunni-Syiah di Indonesia”,¹⁰² dan mengadakan diskusi publik tentang “Partai Politik dan Korupsi; Akar Persoalan dan Pemecahannya,” yang bertujuan memberikan sumbangan bagi pemecahan masalah korupsi partai politik tanah air, membuka wawasan dan ruang diskusi terhadap masyarakat umum mengenai praktik politik kartel yang terjadi di Indonesia.¹⁰³

Dalam menghadapi kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2013, Muhammadiyah mengambil sikap dengan mengadakan ruang diskusi dengan OKP-Ormas, mahasiswa, tokoh agama dan umum dan menghasilkan

⁹⁶ Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Laporan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Disampaikan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah Tahun 2014*, Jakarta; LHKP, 2014, hlm. 2.

⁹⁷ *Ibid.* dan hlm. 7.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 4 dan 10.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 4 dan 9.

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 7.

¹⁰² *Ibid.* hlm. 2

¹⁰³ *Ibid.*

rekomendasi kepada Pemerintah, melalui konferensi pers Muhammadiyah menyatakan; pemerintah harus membayar mahal kepada rakyat akibat mengurangi subsidi BBM.¹⁰⁴

Menjelang Pemilu 2014, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di dampingi oleh Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan juga Bendahara Umum PP Muhammadiyah Zamroni, menyampaikan dan membacakan pernyataan sikap politik Muhammadiyah yang terdiri dari tujuh poin tentang Pemilu 2014, yang esensinya mempertegas sikap politik netral Muhammadiyah.¹⁰⁵ Bahkan sebelumnya, pada tanggal 26 Maret 2013, dalam memperkuat sikap politiknya Muhammadiyah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 41/KEP/I.O IBI2013.¹⁰⁶

Dalam upayanya mendorong kadernya untuk menghadapi strategi Pemilu 2014, Muhammadiyah mengadakan diskusi publik dengan tema “Penguatan Kader Politik Angkatan Muda Muhammadiyah dan Strategi Pemenangan Pemilu 2014.” Dialog ini bertujuan untuk membuka ruang diskusi bagi para calon legislatif (Caleg) dan partai politik, serta mendorong kader muda Muhammadiyah dalam strategi pemenangan Pemilu 2014.¹⁰⁷ Selain itu, Muhammadiyah juga mengadakan dialog politik nasional untuk menyongsong perubahan kekuasaan pada Pilpres 2014 yang bertemakan “Muhammadiyah Buktikan Iman dan Amanah untuk Indonesia Berkemajuan dan Bermartabat”. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran politik organisasi masyarakat tersebut, dan diharap menjadi kekuatan besar yang akan mengakomodasi tekad memperbaiki Indonesia,¹⁰⁸ dan menggali gagasan politik Muhammadiyah. Beberapa narasumbernya antara lain, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, mantan ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif, dan Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amin Rais. Selain itu, ada juga Zulkifli Hasan, mantan wapres Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan pengamat politik Bachtiar Efendy serta Chusnul Mariyah.¹⁰⁹

3. Memperkuat Jaringan, Komunikasi dan Hubungan Antar Organisasi dan Lembaga Pemerintahan

Khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Benegara dalam salah satu poinnya menjelaskan bahwa pentingnya menjalin hubungan dan kerjasama kepada pihak manapun, guna untuk membangun bangsa yang lebih baik.¹¹⁰ Usaha Muhammadiyah dalam menguatkan jaringan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan, yaitu dengan mengembangkan jaringan dan jalinan sinergis antara kader dan simpatisan

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm 2 dan 7.

¹⁰⁵ Dilansir dari laman web: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/01/16/mzlg8-ini-pernyataan-sikap-muhammadiyah-hadapi-pemilu-2014, 12/07/14, 08.19 WIB>

¹⁰⁶ Dalam SK PP Muhammadiyah No 41/KEP/I.O IBI2013 intinya menjelaskan Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Organisasi Otonom, Pimpinan Badan Pembina Harian, Pimpinan-r Amal Usaha Muhammadiyah, dan tenaga tetap/tidak tetap di lingkungan Persyarikatan/Amal Usaha Muhammadiyah tidak boleh merangkap jabatan dengan organisasi politik manapun. *Terlampir.*

¹⁰⁷ Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Op.Cit.*, hlm 2 dan 7..

¹⁰⁸ Dilansir dari laman web: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/04/02/n3dyd3-muhammadiyah-tegaskan-peran-politiknya, 12/07/2014. 07.45 WIB>

¹⁰⁹ Dilansir dari laman web: <http://news.bisnis.com/read/20140402/355/216314/politik-muhammadiyah-ini-penjelasan-din-syamsuddin, 12/07/14, 07.56 WIB>

¹¹⁰ Poin ke 9 *Khittah* Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Denpasar 2002, dalam Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah...*, *Op.Cit.*, hlm 38

Muhammadiyah yang berada di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga strategis. Langkah awal dilakukan adalah menyusun *database* kader Muhammadiyah yang berada di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Melalui LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengintruksikan ke Pimpinan Wilayah dan diteruskan Pimpinan Kabupaten/Kota untuk mendata kader-kadernya yang berada di lembaga pemerintahan.¹¹¹ Selain itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan kerjasama dalam bentuk Penandatanganan Naskah Kesepahaman antara dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, yang bertujuan terbentuknya kesepahaman antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Kementerian Hukum dan HAM tentang berbagai macam isu-isu hukum dan hak asasi manusia, antar lain; pembentukan peraturan perundang-undangan, sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan, dan advokasi dan pelayanan serta pembinaan keagamaan pada warga binaan.¹¹²

Muhammadiyah dalam menguatkan peran jaringan kerjasama lintas lembaga juga melakukan kerjasama antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui LHKP dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dalam menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai “Radikalisasi Pancasila” akademisi, aktivis kepemudaan, tokoh agama, dan pemikir kebangsaan.¹¹³ Selanjutnya, juga melakukan kerjasama lintas lembaga, antara lain Melakukan seminar dan diskusi publik tentang isu-isu politik dan kebijakan publik kontemporer, di antaranya Diskusi Publik “Dialog antar mazhab; Konstruksi Relasi Sunni-Syiah di Indonesia” yang bertujuan mengoptimalkan harmonisasi antar masyarakat beragama, faham dan keyakinan, melihat kembali jejak Syi’ah di Indonesia, melihat pengaruh sosial keagamaan dan intelektual serta politik Syi’ah Indonesia, meninjau kemungkinan pengaruh global terhadap reaksi Sunni-Syi’ah di Indonesia, dan memberikan gambaran tentang relasi Sunni-Syi’ah dalam konteks kebangsaan.¹¹⁴

Selanjutnya mengadakan kegiatan *Training of Trainer* (TOT) Sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika di lingkungan Muhammadiyah. Kerjasama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah dengan MPR RI. Sebelumnya juga Muhammadiyah telah melakukan sosialisasi 4 pilar ini dengan dihadiri oleh perwakilan pengurus Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari segi normatif, aplikatif, dan substantif serta menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab tentang empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada pelatih atau kader LHKP.¹¹⁵

Dalam menjalin hubungan yang lebih luas, Muhammadiyah terlibat dalam kerjasama luar negeri, di antaranya bekerjasama dengan *Konrad Adenauer School for Young Politicians* (KASYP), yaitu dengan mengirimkan delegasi/peserta utusan LHKP

¹¹¹ Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹¹² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Laporan Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015*, Bandung; PP Muhammadiyah, 2012, hlm. 180.

¹¹³ Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

¹¹⁴ Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Op.Cit.*, 3.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 4 dan 9, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Laporan Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015*, *Op.Cit.*, hlm 184.

pada *Workshop International* dengan tema “*Youth and Politics*” dengan penyelenggara *Konrad Adenauer School for Young Politicians (KASYP)* di Singapura.¹¹⁶

Tahun 2014 adalah tahun dimana Muhammadiyah banyak menjalin hubungan dan komunikasi terlebih-lebih terhadap kalangan elite politik. Momen Pemilu 2014 menuntut Muhammadiyah melakukan berbagai kegiatan dalam penyadaran dan pengambilan sikapnya terhadap pemilu. Salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan Dialog Politik Nasional “Muhammadiyah Buktikan Iman dan Amanah untuk Indonesia Berkemajuan dan Bermartabat” tanggal 2-3 April 2014, dengan menghadirkan beberapa kalangan seperti Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Ormas serta para kedutaan negara sahabat, dan dihadiri para pembicara seperti Zulkifli Hasan, mantan wapres Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan pengamat politik Bachtiar Efendy.¹¹⁷

4. Meningkatkan Fungsi Advokasi Berupa Aksi dan Pelayanan Terhadap Kepentingan Masyarakat

Politik Muhammadiyah bergerak pada wilayah sosial kemanusiaan dan menentang segala penyimpangan yang ditimbulkan oleh kekuasaan. Apabila kekuasaan memerhatikan prinsip-prinsip keadilan, jauh dari KKN dan secara serius memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, Muhammadiyah memberikan dukungan. Sebagai gerakan moral, kepentingan politik Muhammadiyah adalah agar pemerintahan berjalan lurus, berorientasi kepentingan rakyat, dan mampu memberantas segala tindak yang dapat merugikan negara. Sebaliknya, jika kekuasaan jauh dari prinsip keadilan, tidak serius memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka Muhammadiyah sebagai *interest group* tidak segan-segan akan mengambil sikap responsif dan kritisnya.¹¹⁸

Dalam memberikan dukungan dan kritik terhadap pemerintah ini lah, Muhammadiyah kerap melakukan advokasi berupa aksi dan pelayanan sebagai kekuatan alternatif penyalur kepentingan masyarakat. Misalnya dalam usaha Muhammadiyah dalam melakukan gugatan perundang-undangan dan pengajuan *judicial review* seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi (UU Migas) yang dianggap mengakomodir kepentingan dan membuka peluang bagi korporasi internasional merambah lahan bisnis migas di Indonesia.¹¹⁹ Proses persidangan menghabiskan waktu kurang lebih enam bulan, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengambil keputusan pada tanggal 13 November 2012. MK mengabulkan sebagian besar permohonan pemohon dari pasal-pasal yang digugat.¹²⁰ Melalui putusan tersebut, akhirnya Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dibubarkan, sebagai gantinya presiden mengumumkan pembentukan

¹¹⁶ Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Op.Cit.*, hlm. 4 dan 9.

¹¹⁷ Dilansir dari laman web: <http://news.bisnis.com/read/20140402/355/216314/politik-muhammadiyah-ini-penjelasan-din-syamsuddin>, 12/07/14, 07.56 WIB.

¹¹⁸ Lihat poin ke 9 *Khittah Muhammadiyah* dalam *Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Denpasar 2002, dalam Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah...*, *Op.Cit.*, hlm 37-38, dan dalam Pokok Pikiran Identitas dan Karakter Muhammadiyah, dalam A Rosyad Sholeh, Identitas Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah 02 / 98 | 16 - 31 Januari 2013, *Op.Cit.*, hlm. 26

¹¹⁹ Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah, *Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja*, Jakarta, 2014, hlm. 2.

¹²⁰ *Ibid.*

Satuan Kerja Migas dibawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 16 November 2012.¹²¹

Di sisi lain, Pimpinan Pusat Muhammadiyah selaku pemohon, melaukan gugatan terhadap UU lainnya, yaitu menyatakan keberatan terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit), UU Rumah Sakit mengharuskan semua Rumah Sakit berbadan hukum. Bagi Rumah Sakit swasta, termasuk Rumah Sakit Muhammadiyah mengeluarkan biaya pendirian termasuk biaya perizinan, administrasi dan waktu, sehingga Muhammadiyah akan mengalami kerugian materiil dan immateril.¹²² Dalam putusannya, MK menyatakan seluruh rumah sakit yang telah didirikan oleh badan hukum swasta yang bersifat nirlaba, seperti perkumpulan atau yayasan telah mendapatkan izin dari pemerintah sebelum diberlakukan UU Rumah Sakit ini tetap sah dan harus diperpanjang izinnya, sehingga tidak memerlukan perubahan status dengan membentuk badan hukum baru yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha perumahsakit.¹²³

Selanjutnya, Muhammadiyah juga menjadi penyalur aspirasi dan berperan dalam upaya menggugat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dianggap bertentang secara keseluruhan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dianggap memberikan pembatasan hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul, serta dianggap sebagai bentuk arogansi pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma bermaksud mengatur. Pengaturan yang berlebihan dari hal tujuan, simbol, lambang, hingga urusan rumah tangga ormas menjadi objek pengaturan yang terkesan berlebih-lebihan.¹²⁴ Selain itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, melalui Majelis Hukum dan HAM memberikan kajian dan pemikiran mengenai pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU SDA), yang dianggap membawa nilai-nilai liberalisasi dan ini jelas bertentang dengan tujuan negara dan norma-norma yang termaktub dalam UUD 1945.¹²⁵ UU Ormas dan UU SDA tersebut sampai sekarang belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi.

Usaha-Usaha Muhammadiyah dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat sebenarnya masih banyak, tetapi masih tahap pengkajian. Melalui Majelis Hukum dan HAM, Muhammadiyah juga mengkaji Undang-Undang Zakat dan Pengelolaan Keuangan Haji, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang APBN-P Tahun 2012, dan lain-lain.¹²⁶ Selain itu, usaha lain yang dilakukan Muhammadiyah dalam melakukan fungsi advokasi, misalnya dalam memberikan dukungan kepada Prita Mulyasari atas rencana pengajuan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 882

¹²¹ *Ibid.* hlm. 4

¹²² *Ibid.* hlm. 7-8

¹²³ Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah, *Op.Cit.* hlm. 8-9, dan dilansir dari laman web: <http://www.antaranews.com/berita/435514/mk-kabulkan-gugatan-muhammadiyah-terkait-rumah-sakit>, 11/07/2014, 21.28 WIB.

¹²⁴ Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah, *Op.Cit.* hlm. 10-18.

¹²⁵ *Ibid.* hlm. 19-20

¹²⁶ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Laporan Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015*.

K/PID.SUS/2010 tanggal 12 Juli 2012,¹²⁷ mengadvokasi sengketa aset-aset Rumah Sakit Islam, sengketa tanah wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cileungi, penyelesaian atas larangan pemakaian rok oleh Akedemi Kebidanan Muhammadiyah Banda Aceh, penyelesaian atas tanah milik persyarikatan Muhammadiyah Cabang Gombang, dan mengadvokasi penyelesaian sengketa aset Muhammadiyah Ranting Hutabalang.¹²⁸

Sikap politik yang dijalankan oleh Muhammadiyah yang telah dijabarkan di atas tidak lain sebagai wujud komitmen dan konsistensi untuk selalu membangun visi dan karakter bangsa sebagai ikhtiar menindaklanjuti dan meluruskan kembali reformasi sesuai cita-cita kemerdekaan tahun 1945, yang sesuai amanat Muktamar ke-46 dan agenda Muhammadiyah abad kedua melalui visi jangka menengah 2010-2015. Usaha untuk membangun Muhammadiyah di usianya yang memasuki abad kedua saat ini perlu adanya niat, komitmen, kesungguhan, kebersamaan, keberanian, pikiran-pikiran baru, kerja keras, dan segala tindakan yang optimal untuk mewujudkan semua ikhtiar dalam mencapai tujuan dan semangat pembaruan, dan semua itu tergantung oleh orang Muhammadiyah itu sendiri.

KESIMPULAN

Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang memfokuskan gerakannya pada bidang sosial keagamaan. Sebagai sebuah *civil society*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Alexis de Tocqueville bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai kekuatan penyangga negara, Muhammadiyah sebagai *civil society* memiliki fungsi politik. Kedudukan Muhammadiyah sebagai *civil society* yang memiliki fungsi politik dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sikap yang diambil Muhammadiyah dalam menghadapi politik, khususnya politik praktis yang berkaitan dengan perjuangan kekuasaan, Muhammadiyah memiliki sikap menjaga jarak dan tidak terlibat, sedangkan dalam politik kebangsaan bersikap aktif sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah. Dalam memosisikan diri di hadapan Negara/Pemerintah, Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap *amar ma'ruf nahi munkar* dalam makna memberikan dukungan pada kebijakan-kebijakan yang positif, sebaliknya melakukan kritik secara bijaksana terhadap kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak baik.
- b. Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat madani (*civil society*) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai *Alqur'an* dan *As-sunnah*.
- c. Dinamika politik yang terjadi pada tahun 2010, yang dimulai pada Muktamar Muhammadiyah hingga pertengahan tahun 2014 menjelang Pemilu dan Pilpres 2014, adalah berupa manuver-manuver yang coba dilakukan oleh elite-elite Muhammadiyah itu sendiri, yang secara tidak langsung telah menggoyahkan prinsip *khittah*,

¹²⁷ Pihak yang terlibat dalam pengkajian putusan Mahkamah Agung ini PP Muhammadiyah, Perwakilan Ormas Perempuan, PP Aisyiah, Lembaga Ortom, Media Cetak dan Elektronik, serta simpatisan. Hasil dari kajian dan tanggapan serta sikap Muhammadiyah terhadap putusan kasasinya Prita Mulyasari tersebut disampaikan melalui konferensi pers, dalam Laporan Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015, *Op.Cit.*, hlm. 184.

¹²⁸ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 2012; Pokok Pikiran Tanwir Muhammadiyah 2012 untuk Pencerahan dan Solusi Permasalahn Bangsa*, *Op.Cit.*, hlm.

keperibadian Muhammadiyah dan *high politics* yang selama ini coba dilakukan oleh warga Muhammadiyah.

- d. Upaya meningkatkan pemberdayaan, pembinaan, pengembangan dan pendidikan politik bagi warga Muhammadiyah yang telah dijabarkan dapat dianalisis bahwa Pimpinan Muhammadiyah sebagian besar masih menyentuh wilayah pusat atau kalangan atas saja dan belum menyeluruh tersosialisasikan ke warga-warga Muhammadiyah yang berada di kalangan bawah yang ada di daerah-daerah. Oleh karena itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik hendaknya meningkatkan pemberdayaan, pembinaan, pengembangan dan pendidikan politik bagi warga Muhammadiyah melalui perluasan jaringan internal Muhammadiyah di berbagai daerah di Indonesia.
- e. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam meningkatkan keterlibatan dan partisipasi kebangsaan terhadap persoalan aktual dan isu-isu kontemporer kebangsaan, belum memiliki *output* yang jelas dan dapat dirasakan. Karena kegiatan-kegiatan diskusi yang dilakukan, menurut peneliti hanya pada tataran pembahasan dan keprihatinan terhadap isu yang berkembang serta terkesan hanya menjalankan program kerja semata, sehingga perlu mengadakan manajemen dan agenda *output* atau keluaran hasil dari diskusi-diskusi yang dilakukan, agar memberikan dampak positif yang bisa dirasakan oleh negara dan masyarakat.
- f. Jaringan komunikasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Muhammadiyah belum intensif dilakukan dengan organisasi keislamannya lainnya. Kerjasama ini perlu dan menjadi penting karena dapat mempersatukan umat dan menjadi basis kekuatan umat Islam dalam membantu menyampaikan aspirasinya dan solusi kenegaraan ke pemerintahan.
- g. Usaha-usaha yang dilakukan Muhammadiyah dalam mengadvokasi umumnya masih menyentuh kepada kebutuhan warga Muhammadiyah itu sendiri dan belum menyentuh kebutuhan masyarakat umum, terutama masyarakat Islam. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia hendaknya perlu mengadakan upaya yang lebih agresif dalam meningkatkan fungsi advokasi berupa aksi dan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amal, Ichlasul, 1996, *Teori Mukhtahir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hikam, Muhammad A.S, 2000. *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Erlangga.
- Horrison, Lisa 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Jurdi, Fajlurrahman. 2007. *Aib Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Juxtapose.
- Jurdi, Syarifuddin, 2010., *Muhammadiyah dalam Dinamikan Politik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

- Kuntowijoyo, dkk, *Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru*, Bandung: Mizan, 1995.
- Kurniawan, Luthfi J, dkk. 2008. *Negara, Civil Society dan Demokratisasi: Pergerakan Membangun Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan*. Malang: INTRANS Publishing.
- Miftahulhaq, dkk, 2013, *Buku Pintar Anggota Muhammadiyah*, Yogyakarta: LPCR PP Muhammadiyah.
- Moleong, Lexy J. 2007, *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, Bandung: ROSDA.
- Mu'arif, 2005, *Meruwat Muhammadiyah: Kritik Seabad Pembaruan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Nashir, Haedar, 2006, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, Malang: UMM Press.
- Nashir, Haedar. 2006. *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. Malang: UMM Press.
- Nashir, Haedar. 2008. *Khittah Muhammadiyah tentang Poltik*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nashir, Haedar. 2011. *Muhammdiyah Abad Kedua*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1996. *Pedoman Bemuhammadiyah*. Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah.
- Rais, Amien, 2004, *Hubungan Antara Politik dan Dakwah; Berguru Kepada Muhammad Natsir*, Bandung: Mujahid.
- Salim, Agus, 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suwarno. 2001. *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*. Yogyakarta: UII Press.
- Tim Pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyah. 1990. *Muhammadiyah: Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Artikel

Pradana Boy, 2009, *PAN, PMB, Muhammadiyah, dan Pemilu 2009* (Artikel), Malang.

Dokumen

Laporan Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015.

Lembaga Hikmah dan Kebiajakn Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2014, *Laporan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Disampaikan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah Tahun 2014*, Jakarta; LHKP.

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah, 2014, *Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja*, Jakarta.

Pernyataan Sikap Muhammadiyah tentang Pemilihan Umum Tahun 2014.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1985. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: Majelis Pustaka.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1953, *Laporan PP Muhammadiyah pada Mukhtamar XXXII; Purwokerto 09-14 Djuli 1953*, Yogyakarta.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2012, *Laporan Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015*, Bandung; PP Muhammadiyah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2002, *Penjelasan Sikap Muhammadiyah tentang Penegakkan Syari'at Islam dan Perubahan Pasal 29 UD 1945*, Yogyakarta.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pokok Pikiran dan Sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap RUU ORMAS*, Jakarta, 2013

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2012, *Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 2012; Pokok Pikiran Tanwir Muhammadiyah 2012 untuk Pencerahan dan Solusi Permasalahn Bangsa*, PP Muhammadiyah; Yogyakarta.

Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 41/KEP/I.O IB12013 Tentang Perubahan Ketentuan Pencalonan dalam Pemilu dan Pemilukada dari Lingkungan Psesyarikatan Muhammadiyah

Penelitian

Marsudi, M. Sholeh, 2009, Prilaku Politik Prakris Din Syamsuddin dalam Perspektif *Khittah* Muhammadiyah, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (Skripsi).

Surat Kabar

Jinan, Mutoharrun, *Muhammadiyah dalam Bayang-Bayang Politik Praktis*, dalam Media Indonesia, Jum'at, 30 April 2004.

Suara Muhammadiyah 02 / 98 | 16-31 Januari 2013/4-19 Rabiulawal 1434 H.

Wawancara

Wawancara dengan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Haedar Nashir, di Kediaman Haedar Nashir, Paleman, Taman Tiirto Utara, Kasihan, Bantul, pada tanggal 12 Desember 2013, pukul 10.10 WIB.

Wawancara dengan Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1998-2005, Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif di Sahid Rich Hotel di Jl. Magelang No.8, Km 6, tanggal 28 November 2013, pukul 12.55 – 13.15 WIB.

Wawancara dengan Ketua Umum Perwakilan Pimpinan Pusat Persis Kawasan Timur, Salam Rissyad, di Kediaman Salam Rissyad, tanggal 15 Februari 2014, pukul 21.46 WIB.



Wawancara dengan Dr. EM. Sangadji, Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, di Kantor Kepala Sekolah Yayasan Ahmad Yani Malang, pada tanggal 18 Agustus 2014, pukul 12.15 WIB.

Wawancara dengan Prof. Dr. Thohir Luth, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Sekretariat PPA, Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Lt. 5, tanggal 26 Agustus 2014, pukul 12.30 WIB.

Wawancara dengan Ketua Umum DPP IPM, Fida Afif di Kantor DPP IPM di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jalan, K.H. Ahmad Dahlan, Yogyakarta, tanggal 27 November 2013, pukul. 12.15 WIB.

Wawancara dengan Ketua Umum DPP Nasyyatul Aisyiah, Norma Asri, SH, M.Hum, di Sekretariat DPP IPM di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jalan, K.H. Ahmad Dahlan, Yogyakarta, tanggal 27 November 2013, pukul 17.00 WIB.

Website

Meylia Hasiantha, *Konsep Civil Society*, hlm. 6. Dalam:

<http://www.scribd.com/doc/89866695/Konsep-Civil-Society#download>,
15/10/2013, 18.20 WIB.

<http://news.detik.com/read/2014/05/24/073311/2591373/1562/datang-ke-tanwir-muhammadiyah-jokowi-salaman-dengan-amien-rais?992204topnews>,
27/08/2014, pukul 23.09 WIB dan dari laman web:
<http://news.detik.com/read/2014/05/24/113417/2591434/1562/tiba-di-tanwir-muhammadiyah-prabowo-disambut-takbir>, 27/08/14, pukul 23.10 WIB.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/04/02/n3dyd3-muhammadiyah-tegaskan-peran-politiknya>, 12/07/2014. 07.45 WIB

<http://news.bisnis.com/read/20140402/355/216314/politik-muhammadiyah-ini-penjelasan-din-syamsuddin>, 12/07/14, 07.56 WIB.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/01/16/mzlg8-ini-pernyataan-sikap-muhammadiyah-hadapi-pemilu-2014>, 12/07/14, 08.19 WIB

<http://news.detik.com/read/2008/12/27/045823/1059849/709/partai-matahari-bangsa--18->,
30/06/2014. 06.05 WIB.

http://bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=34¬ab=4,
30/06/2014, 06.07 WIB.

<http://news.detik.com/read/2014/05/17/155548/2584751/1562/sikap-din-syamsuddin-yang-kedepankan-politik-adiluhung-dipuji?n992204fksberita>, 27/08/14, 17.54 WIB. dan dari laman web: <http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2050251/din-tak-arahkan-warga-muhammadiyah-ke-capres-tertentu>, 27/08/14, 17.55 WIB.

“Berilmu Amaliah, Beramal I Imiah”